TANAH BUMBU

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

KECAMATAN SATUI

Alamat : Jalan KH.Idham Chalid RT. 07 Desa Makmur Jaya Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan - Kode Pos 72276

<u>Laman: www.kec-satui.tanahbumbukab.go.id</u> <u>Pos-El: kantorkecamatansatui@gmail.com</u>

KEPUTUSAN CAMAT SATUI

NOMOR: B/000.8.3.2/35 /Kec.STI-Pel.Umum/I/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN SATUI

CAMAT SATUI,

Menimbang

- : a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan camat SATUI tentang Penetapan standar Pelayanan Publik Kecamatan SATUI Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tanah 2014 Nomor 5587);
 - 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentangPedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 10. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 12. Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 13. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsurunsur Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
- Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34);
- 19. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun2023 Nomor 28).

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN CAMAT SATUI TENTANG STANDAR PELAYANAN Menetapkan

PUBLIK KECAMATAN SATUI

KESATU : Standar Pelayanan Kecamatan Satui sebagaimana dalam lampiran

keputusan ini.

Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) **KEDUA** 1.

> 2. Legalisasi Surat Keterangan Kematian (SKK)

Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 3.

Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Legalisasi Surat Keterangan Bantuan Sosial 5.

Legalisasi Surat Keterangan Pensiun

7. Legalisasi Surat Keterangan Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI

8. Legalisasi Proposal

9. Legalisasi Surat Keterangan Kepemilikan Kapal

10. Rekomendasi Persetujuan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

11. Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

12. Rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDG)

13. Rekomendasi Izin Penumpukan Barang (IPB)

14. Rekomendasi Izin Bongkar Muat

15. Rekomendasi Bebas Banjir

16. Rekomendasi Penelitian Mahasiswa

17. Surat Dispensasi Nikah

Standar Pelayanan Publik Kecamatan Satui sebagaimana dimaksud **KETIGA**

dalam Diktum KEDUA sebagai pedoman bagi setiap pelaksana

pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Satui;

Apabila dalam pelaksanaan terdapat kesalahan dan/atau kekurangan, **KEEMPAT**

Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Satui

KELIMA

Pada tanggal : 02 Januari 2025

AH KAS Samat SATUI,

Ferdi Yospi Libia Erwinda, S.Hut, M.P.

AH BUNDEmbina Tingkat I / IV b NIP. 19781004 200701 1 01

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT SATUI

NOMOR : B/000.8.3.2/ 35 /Kec.STI Pel.Umum/I/2025 TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

KECAMATAN SATUI

Tanggal: 02 Januari 2025

1. STANDAR PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN AHLI WARIS (SKAW)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan/Desa Fotocopy KK Semua Ahli Waris Fotocopy KTP Semua Ahli Waris Fotocopy Akta Kematian Fotocopy surat pernyataan Ahli Waris bermaterai 10.000
2.	Prosedur	 Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan Pemohon mengambil nomor antrian untuk mendaftarkan permohonan Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat Pemohon menerima Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) yang sudah di legalisasi
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW)
6.	Penanganan Pengaduan	 Langsung Petugas di kantor Kecamatan Satui Alamat : Jalan KH. Idham Chalid RT. 07 Desa Makmur Jaya Kec. Satui Tidak Langsung melalui media : Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter) Email : e-mail : kantorkecamatansatui@gmail.com Website : www.kec-satui.tanahbumbukab.go.id Kotak Saran/Pengaduan

7	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Perkawinan;
		 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan.
8.	Sarana dan Prasarana	Loket Pelayanan, Ruang Tunggu, Komputer, Printer, ATK, papan informasi tentang pelayanan, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Rak Penyimpanan Berkas, Internet/Wifi, AC, Parkir danToilet
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan Kecamatan Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanan Publik Motto "MANTAP (Melayani dengan Amanah, Nyaman,Transparan, Akuntabel dan Profesional) " Menerapkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) Pendidikan minimal SMA
10	Jumlah Pelaksana	4 orang terdiri dari 1 orang Kasi Pelayanan Umum 1 orang petugas loket dan 2 orang pengelola administrasi pelayanan non perizinan
11.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-
13.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern Laporan Harian Survei Kepuasan Masyarakat Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan Review perilaku pada e-kinerja setiap bulan oleh atasan langsung

2. STANDAR PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN KEMATIAN (SKK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan Fotocopy KK yang meninggal Fotocopy KTP yang meninggal
2.	Prosedur	 Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan Pemohon mengambil nomor antrian untuk mendaftarkan permohonan Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat Pemohon menerima Surat Keterangan Kematian (SKK) yang sudah di legalisasi
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Legalisasi Surat Keterangan Kematian (SKK)
6	Penanganan Pengaduan	 Langsung Petugas di kantor Kecamatan Satui Alamat : Jalan KH. Idham Chalid RT. 07 Desa Makmur Jaya Kec. Satui Tidak Langsung melalui media : Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter) Email : e-mail : kantorkecamatansatui@gmail.com Website : www.kec-satui.tanahbumbukab.go.id Kotak Saran/Pengaduan

7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34); Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28).
8.	Sarana dan Prasarana	Loket Pelayanan, Ruang Tunggu, Komputer, Printer, ATK, papan informasi tentang pelayanan, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Rak Penyimpanan Berkas, Internet/Wifi, AC, Parkir danToilet
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan Kecamatan Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanan Publik Motto "MANTAP (Melayani dengan Amanah, Nyaman,Transparan, Akuntabel dan Profesional) " Menerapkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) Pendidikan minimal SMA
10	Jumlah Pelaksana	4 orang terdiri dari 1 orang Kasi Pelayanan Umum 1 orang petugas loket dan 2 orang pengelola administrasi pelayanan non perizinan
11.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-
13.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern Laporan Harian Survei Kepuasan Masyarakat Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan Review perilaku pada e-kinerja setiap bulan oleh atasan langsung

3. STANDAR PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	 Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan yang diketahui RT Fotocopy KK Fotocopy KTP
2.	Prosedur	 Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan Pemohon mengambil nomor antrian untuk mendaftarkan permohonan Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat Pemohon menerima Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang sudah di legalisasi
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
6.	Penanganan Pengaduan	 Langsung Petugas di kantor Kecamatan Satui Alamat : Jalan KH. Idham Chalid RT. 07 Desa Makmur Jaya Kec. Satui Tidak Langsung melalui media : Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter) Email : e-mail : kantorkecamatansatui@gmail.com Website : www.kec-satui.tanahbumbukab.go.id Kotak Saran/Pengaduan

_	Б	
7	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
		Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang
		Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin
		melalui Pendekatan Wilayah;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
		Standar Pelayanan Minimal; 6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
		Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
		sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
		tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
		7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang
		Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017
		tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data
		Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak
		Mampu; 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018
		tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk
		Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
		10. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada
		Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten
		Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28).
8.	Sarana dan Prasarana	Loket Pelayanan, Ruang Tunggu, Komputer, Printer,
		ATK, papan informasi tentang pelayanan, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Rak Penyimpanan Berkas,
		Internet/Wifi, AC, Parkir danToilet
9.	Kompetensi Pelaksana	Memahami peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan Kecamatan
		Memahami peraturan yang berlaku terkait
		Pelayanan Publik
		3. Motto "MANTAP (Melayani dengan Amanah, Nyaman,Transparan, Akuntabel dan Profesional) "
		4. Menerapkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun,
		Sopan) 5. Pendidikan minimal SMA
10	Jumlah Pelaksana	4 orang terdiri dari 1 orang Kasi Pelayanan Umum 1
		orang petugas loket dan 2 orang pengelola administrasi
11.	Jaminan Pelayanan	pelayanan non perizinan Maklumat Pelayanan Informasi Publik
12	Jaminan Keamanan dan	 -
	Keselamatan Pelayanan	
13.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi
		Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi
		Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat koordinasi intern
	-	2. Laporan Harian
		Survei Kepuasan Masyarakat Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan
		Eaporan Capalan Kinerja Triwulan dan Tahuhan Review perilaku pada e-kinerja setiap bulan oleh
		atasan langsung

4. STANDAR PELAYANAN LEGALISASI SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPPFBT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Segel/Sporadik ada 4 Lembar (1 Kertas tebal & 3 Kertas Biasa) Bukti Lunas PBB/Pendaftaran PBB Surat Permohonan Legalisasi Sporadik Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Surat Pernyataan Asal Pengusaan Tanah Surat Pernyataan Rt Dan Dusun Lokasi Tanah Surat Pernyataan Saksi-Saksi Data Pembuatan Surat Keterangan Tanah Berita Acara Pengukuran Surat Penyataan Pemasangan Tanda Batas Batok Kwitansi Jual Beli (Apabila Hasil Jual Beli) Surat Pernyataan Hibah (Apabila Tanah Hibah) Denah Lokasi Tanah Ktp Bersangkutan Ktp Saksi-Saksi
2.	Prosedur	 Rip Saksi-Saksi Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan Pemohon mengambil nomor antrian untuk mendaftarkan permohonan Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat Pemohon menerima Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) yang sudah di legalisasi
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (tiga) hari
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT)
6.	Penanganan Pengaduan	 Langsung Petugas di kantor Kecamatan Satui Alamat : Jalan KH. Idham Chalid RT. 07 Desa Makmur Jaya Kec. Satui Tidak Langsung melalui media : Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter) Email : e-mail : kantorkecamatansatui@gmail.com Website : www.kec-satui.tanahbumbukab.go.id KotakSaran/Pengaduan

7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
	Dasai Hukum	Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 3. Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022Nomor 2); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 5. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34); 6. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28).
8.	Sarana dan Prasarana	
0.	Sarana dan Prasarana	Loket Pelayanan, Ruang Tunggu, Komputer, Printer, ATK, papan informasi tentang pelayanan, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Rak Penyimpanan Berkas, Internet/Wifi, AC, Parkir danToilet
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan yang berlaku terkaitpelaksanaan kegiatan Kecamatan Memahami peraturan yang berlaku terkaitPelayanan Publik Motto " MANTAP (Melayani dengan Amanah, Nyaman,Transparan, Akuntabel dan Profesional) " Menerapkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) Pendidikan minimal SMA
10	Jumlah Pelaksana	Tim SPPFBT Kecamatan Satui : 10 orang
11.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-
13.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan PengawasanPemerintah Daerah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat koordinasi intern Laporan Harian Survei Kepuasan Masyarakat Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan Review perilaku pada e-kinerja setiap bulan olehatasan langsung

5. STANDAR PELAYANAN LEGALISASI KETERANGAN BANTUAN SOSIAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Fotocopy KK Fotocopy KTP Proposal Bantuan Sosial dari Kelurahan/Desa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah
2.	Prosedur	 Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan Pemohon mengambil nomor antrian untuk mendaftarkan permohonan Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas Pengolahan Surat Rekomendasi Penandatanganan Surat Rekomendasi Pengelolaan Pengadministrasian Surat Rekomendasi Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat Pemohon menerima Surat Rekomendasi Bantuan Sosial
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Legalisasi Surat Keterangan Bantuan Sosial
6.	Penanganan Pengaduan	 Langsung Petugas di kantor Kecamatan Satui Alamat : Jalan KH. Idham Chalid RT. 07 Desa Makmur Jaya Kec. Satui Tidak Langsung melalui media : Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter) Email : e-mail : kantorkecamatansatui@gmail.com Website : www.kec-satui.tanahbumbukab.go.id Kotak Saran/Pengaduan
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34); Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28).

8.	Sarana dan Prasarana	Loket Pelayanan, Ruang Tunggu, Komputer, Printer, ATK, papan informasi tentang pelayanan, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Rak Penyimpanan Berkas, Internet/Wifi, AC, Parkir danToilet
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan Kecamatan Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanan Publik Motto " MANTAP (Melayani dengan Amanah, Nyaman,Transparan, Akuntabel dan Profesional) " Menerapkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) Pendidikan minimal SMA
10	Jumlah Pelaksana	4 orang terdiri dari 1 orang Kasi Pelayanan Umum 1 orang petugas loket dan 2 orang pengelola administrasi pelayanan non perizinan
11.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-
13.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern Laporan Harian Survei Kepuasan Masyarakat Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan Review perilaku pada e-kinerja setiap bulan oleh atasan langsung

6. STANDAR PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN PENSIUN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Surat Keterangan Pensiunan dari Kepala Desa/Lurah Fotocopy SK Pensiun yang bersangkutan Fotocopy KK Fotocopy KTP
2.	Prosedur	 Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan Pemohon mengambil nomor antrian untuk mendaftarkan permohonan Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat Pemohon menerima Surat Keterangan Pensiun yang sudah di legalisasi
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
4. 5.	Biaya Produk Layanan	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan	Legalisasi Surat Keterangan Pensiun 1. Langsung Petugas di kantor Kecamatan Satui
0.	i Gilaliyallalı F Gilyaudalı	Alamat: Jalan KH. Idham Chalid RT. 07 Desa Makmur Jaya Kec. Satui 2. Tidak Langsung melalui media: - Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter) - Email: e-mail: kantorkecamatansatui@gmail.com - Website: www.kec-satui.tanahbumbukab.go.id 3. Kotak Saran/Pengaduan

7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34); Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28).
8.	Sarana dan Prasarana	Loket Pelayanan, Ruang Tunggu, Komputer, Printer, ATK, papan informasi tentang pelayanan, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Rak Penyimpanan Berkas, Internet/Wifi, AC, Parkir danToilet
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan Kecamatan Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanan Publik Motto " MANTAP (Melayani dengan Amanah, Nyaman,Transparan, Akuntabel dan Profesional) " Menerapkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) Pendidikan minimal SMA
10	Jumlah Pelaksana	4 orang terdiri dari 1 orang Kasi Pelayanan Umum 1 orang petugas loket dan 2 orang pengelola administrasi pelayanan non perizinan
11.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-
13.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan PengawasanPemerintah Daerah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern Laporan Harian Survei Kepuasan Masyarakat Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan Review perilaku pada e-kinerja setiap bulan olehatasan langsung

7. STANDAR PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN PENGAJUAN PENDAFTARAN TNI/POLRI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Surat Keterangan Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI Fotocopy KK Fotocopy KTP
2.	Prosedur	 Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan Pemohon mengambil nomor antrian untuk mendaftarkan permohonan Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat Pemohon menerima Surat Keterangan Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI yang sudah di legalisasi
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
4. 5.	Biaya Produk Layanan	Gratis Legalisasi Surat Keterangan Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI
6.	Penanganan Pengaduan	1. Langsung Petugas di kantor Kecamatan Satui Alamat : Jalan KH. Idham Chalid RT. 07 Desa Makmur Jaya Kec. Satui 2. Tidak Langsung melalui media : - Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter) - Email : e-mail : kantorkecamatansatui@gmail.com - Website : www.kec-satui.tanahbumbukab.go.id 3. Kotak Saran/Pengaduan

_		A 11 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34); Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28).
8.	Sarana dan Prasarana	Loket Pelayanan, Ruang Tunggu, Komputer, Printer, ATK, papan informasi tentang pelayanan, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Rak Penyimpanan Berkas, Internet/Wifi, AC, Parkir danToilet
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan Kecamatan Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanan Publik Motto "MANTAP (Melayani dengan Amanah, Nyaman,Transparan, Akuntabel dan Profesional) " Menerapkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) Pendidikan minimal SMA
10	Jumlah Pelaksana	4 orang terdiri dari 1 orang Kasi Pelayanan Umum 1 orang petugas loket dan 2 orang pengelola administrasi pelayanan non perizinan
11.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-
13.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern Laporan Harian Survei Kepuasan Masyarakat Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan Review perilaku pada e-kinerja setiap bulan oleh atasan langsung

8. STANDAR PELAYANAN LEGALISASI PROPOSAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Fotocopy Dokumen Proposal
		2. Fotocopy KTP Pengurus
2.	Prosedur	1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan 2. Pemohon mengambil nomor antrian untuk mendaftarkan permohonan 3. Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon 4. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas 5. Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat 6. Pemohon menerima Dokumen Proposal sudah di legalisasi
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Legalisasi Proposal
6.	Penanganan Pengaduan	Langsung Petugas di kantor Kecamatan Satui Alamat : Jalan KH. Idham Chalid RT. 07 Desa Makmur Jaya Kec. Satui Tidak Langsung melalui media : - Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile appsatau Twitter) - Email : e-mail : kantorkecamatansatui@gmail.com - Website : www.kec-satui.tanahbumbukab.go.id 3. Kotak Saran/Pengaduan

		T
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34); Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28).
8.	Sarana dan Prasarana	Loket Pelayanan, Ruang Tunggu, Komputer, Printer, ATK, papan informasi tentang pelayanan, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Rak Penyimpanan Berkas, Internet/Wifi, AC, Parkir danToilet
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan Kecamatan Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanan Publik Motto " MANTAP (Melayani dengan Amanah, Nyaman,Transparan, Akuntabel dan Profesional) " Menerapkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) Pendidikan minimal SMA
10	Jumlah Pelaksana	4 orang terdiri dari 1 orang Kasi Pelayanan Umum 1 orang petugas loket dan 2 orang pengelola administrasi pelayanan non perizinan
11.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-
13.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern Laporan Harian Survei Kepuasan Masyarakat Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan Review perilaku pada e-kinerja setiap bulan olehatasan langsung

9. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PERSETUJUAN KEGIATAN KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR)

KOMPONEN	URAIAN
Persyaratan	1. Fotocopy KTP Pemohon
•	2. Mengisi Formulir Permohonan
	3. Fotocopy NPWP Perusahaan/Pribadi
	4. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan
	(Khusus PT/CV)
	5. Fotocopy NIB
	6. Izin Lokasi via NIB
	7. Proposal Rencana Kegiatan
	8. Site Plan Rencana Kegiatan & Titik Koordinat
	9. Fotocopy Sertifikat/Segel
	10. Izin Domisili
	11.Rekomendasi dari Kecamatan & Desa
	12.Rekomendasi dan Instansi Teknis
	13. Surat Dukungan dari PLN & PDAM (Perumahan)
	14. Fotocopy Lunas PBB (Wajib*)
	15. Fotocopy PBG
Prosedur	1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa
	persyaratan
	2. Pemohon mengambil nomor antrian untuk
	mendaftarkan permohonan
	3. Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas
	pemohon 4. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka
	diproses, jika berkas tidak memenuhi persyaratan
	maka dikembalikan oleh petugas
	5. Tim melakukan Tinjau lapangan dan membuat Berita
	Acara
	6. Verifikasi Berita Acara Tinjau Lapangan
	7. Pengolahan Surat Rekomendasi
	Penandatanganan Surat Rekomendasi
	9. Pengelolaan Pengadministrasian Surat Rekomendasi
	10.Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan
	Masyarakat 11. Pemohon menerima Surat Rekomendasi Persetujuan
	Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
	regional resource of a real region of the re
Langua Malety Danyalaasian	4 ions
	1 jam Gratis
-	Rekomendasi Persetujuan Kegiatan Kesesuaian
	Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
Penanganan Pengaduan	Langsung Petugas di kantor Kecamatan Satui
	Alamat : Jalan KH. Idham Chalid RT. 07 Desa
	Makmur Jaya Kec. Satui
	Z. Tidak Langsung melalui media : Aplikasi Lapor (<u>www.lapor.go.id</u> , SMS 1708, mobile apps
	atau Twitter)
	- Email : e-mail : kantorkecamatansatui@gmail.com
	- Website : www.kec-satui.tanahbumbukab.go.id 3. Kotak Saran/Pengaduan

7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34); Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28).
8.	Sarana dan Prasarana	Loket Pelayanan, Ruang Tunggu, Komputer, Printer, ATK, papan informasi tentang pelayanan, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Rak Penyimpanan Berkas, Internet/Wifi, AC, Parkir danToilet
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan Kecamatan Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanan Publik Motto " MANTAP (Melayani dengan Amanah, Nyaman,Transparan, Akuntabel dan Profesional) " Menerapkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) Pendidikan minimal SMA
10	Jumlah Pelaksana	4 orang terdiri dari 1 orang Kasi Pelayanan Umum 1 orang petugas loket dan 2 orang pengelola administrasi pelayanan non perizinan
11.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-
13.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern Laporan Harian Survei Kepuasan Masyarakat Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan Review perilaku pada e-kinerja setiap bulan oleh atasan langsung

10. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Fotocopy KTP Pemohon
		Surat permohonan calon pemilik izin bermaterei 10.000
		Surat pernyataan untuk melengkapi kekurangan persyaratan bermaterei 10.000
		4. Fotocopy NPWPD (Khusus Hotel dan Catering)5. Fotocopy NIB
		6. Fotocopy IMB/PBG
		7. Fotocopy Tanda Bukti Lunas PBB
		8. Fotocopy Laik Sehat dari Dinas Kesehatan
		9. Pas foto 3 X 4 sebanyak 2 lembar
		10. Rekomendasi UKL-UPL/AMDAL (Khusus Hotel)
		11. Fotocopy tanda lunas PBB
		12. Sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
		13. Sertifikat standar yang belum terverifikasi / diterbitkan oleh OSS
		14. Izin Asli yang sudah tidak berlaku lagi
2.	Prosedur	Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa
		persyaratan
		2. Pemohon mengambil nomor antrian untuk
		mendaftarkan permohonan
		3. Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon
		4. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas
		5. Tim melakukan Tinjau lapangan dan membuat Berita Acara
		Verifikasi Berita Acara Tinjau Lapangan Pengolahan Surat Rekomendasi
		Penandatanganan Surat Rekomendasi
		Pengelolaan Pengadministrasian Surat Rekomendasi
		10.Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat
		11.Pemohon menerima Surat Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 jam
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
6.	Penanganan Pengaduan	Langsung Petugas di kantor Kecamatan Satui
		Alamat : Jalan KH. Idham Chalid RT. 07 Desa
		Makmur Jaya Kec. Satui
		Tidak Langsung melalui media : Aplikasi Lapor (<u>www.lapor.go.id</u> , SMS 1708, mobile apps atau Twitter)
		- Email: <u>kantorkecamatansatui@gmail.com</u>
		 Website: www.kec-satui.tanahbumbukab.go.id Kotak Saran/Pengaduan
		o. Rotal Calairi ongadaan

8.	Dasar Hukum Sarana dan Prasarana	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34); Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28). Loket Pelayanan, Ruang Tunggu, Komputer, Printer, ATK, papan informasi tentang pelayanan, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Rak Penyimpanan Berkas,
9.	Kompetensi Pelaksana	 Internet/Wifi, AC, Parkir danToilet Memahami peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan Kecamatan Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanan Publik Motto "MANTAP (Melayani dengan Amanah, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Profesional) " Menerapkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)
10	Jumlah Pelaksana	Pendidikan minimal SMA orang terdiri dari 1 orang Kasi Pelayanan Umum 1 orang petugas loket dan 2 orang pengelola administrasi
	<u> </u>	pelayanan non perizinan
11.	Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
12	Keselamatan Pelayanan	-
13.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern Laporan Harian Survei Kepuasan Masyarakat Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan Review perilaku pada e-kinerja setiap bulan olehatasan langsung

11. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Surat Pengantar dari Desa Fotocopy KTP Pemohon Mengisi Formulir Permohonan Fotocopy NPWP Perusahaan/Pribadi Fotocopy NIB Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (Khusus PT/CV) Fotocopy Tanda Bukti Lunas PBB Fotocopy IMB/PBG MOU dengan agen resmi (Khusus Pangkalan LPG) Rekomendasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Khusus Pangkalan LPG) Fotocopy Tanda Bukti Lunas PBB Izin Asli yang sudah tidak berlaku lagi
2.	Prosedur	 Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan Pemohon mengambil nomor antrian untuk mendaftarkan permohonan Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas Tim melakukan Tinjau lapangan dan membuat Berita Acara Verifikasi Berita Acara Tinjau Lapangan Pengolahan Surat Rekomendasi Pengelolaan Pengadministrasian Surat Rekomendasi Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat Pemohon menerima Surat Rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDG)
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 jam
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDG)
6.	Penanganan Pengaduan	Langsung Petugas di kantor Kecamatan Satui Alamat : Jalan KH. Idham Chalid RT. 07 Desa Makmur Jaya Kec. Satui Tidak Langsung melalui media : Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter) Email : e-mail : kantorkecamatansatui@gmail.com Website : www.kec-satui.tanahbumbukab.go.id Kotak Saran/Pengaduan

8.	Dasar Hukum Sarana dan Prasarana	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34); Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28). Loket Pelayanan, Ruang Tunggu, Komputer, Printer, ATK, papan informasi tentang pelayanan, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Rak Penyimpanan Berkas,
9.	Kompetensi Pelaksana	 Internet/Wifi, AC, Parkir danToilet Memahami peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan Kecamatan Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanan Publik Motto "MANTAP (Melayani dengan Amanah, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Profesional) " Menerapkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)
10	Jumlah Pelaksana	Pendidikan minimal SMA orang terdiri dari 1 orang Kasi Pelayanan Umum 1 orang petugas loket dan 2 orang pengelola administrasi
	<u> </u>	pelayanan non perizinan
11.	Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
12	Keselamatan Pelayanan	-
13.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern Laporan Harian Survei Kepuasan Masyarakat Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan Review perilaku pada e-kinerja setiap bulan olehatasan langsung

12. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN PENUMPUKAN BARANG (IPB)

12.		COMENDASI IZIN PENUMPUKAN BAKANG (IPB)
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Surat Pengantar dari Desa Fotocopy KTP Pemohon Mengisi Formulir Permohonan Fotocopy NPWP Perusahaan/Pribadi Fotocopy NIB Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (Khusus PT/CV) Fotocopy Tanda Bukti Lunas PBB Fotocopy IMB/PBG MOU dengan agen resmi (Khusus Pangkalan LPG) Rekomendasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Khusus Pangkalan LPG) Izin Asli yang sudah tidak berlaku lagi
2.	Prosedur	 Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan Pemohon mengambil nomor antrian untuk mendaftarkan permohonan Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas Tim melakukan Tinjau lapangan dan membuat Berita Acara Verifikasi Berita Acara Tinjau Lapangan Pengolahan Surat Rekomendasi Pengelolaan Pengadministrasian Surat Rekomendasi Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat Pemohon menerima Surat Rekomendasi Izin Penumpukan Barang (IPB)
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 jam
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Rekomendasi Izin Penumpukan Barang (IPB)
6.	Penanganan Pengaduan	Langsung Petugas di kantor Kecamatan Satui Alamat : Jalan KH. Idham Chalid RT. 07 Desa Makmur Jaya Kec. Satui Tidak Langsung melalui media : Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter) Email : e-mail : kantorkecamatansatui@gmail.com Website : www.kec-satui.tanahbumbukab.go.id Kotak Saran/Pengaduan

7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34); Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28).
8.	Sarana dan Prasarana	Loket Pelayanan, Ruang Tunggu, Komputer, Printer, ATK, papan informasi tentang pelayanan, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Rak Penyimpanan Berkas, Internet/Wifi, AC, Parkir danToilet
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan Kecamatan Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanan Publik Motto " MANTAP (Melayani dengan Amanah, Nyaman,Transparan, Akuntabel dan Profesional) " Menerapkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) Pendidikan minimal SMA
10	Jumlah Pelaksana	4 orang terdiri dari 1 orang Kasi Pelayanan Umum 1 orang petugas loket dan 2 orang pengelola administrasi pelayanan non perizinan
11.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-
13.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan PengawasanPemerintah Daerah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern Laporan Harian Survei Kepuasan Masyarakat Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan Review perilaku pada e-kinerja setiap bulan olehatasan langsung

13. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN BONGKAR MUAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Rekomendasi Bongkar Muat dari Kelurahan/Desa Surat Permohonan (Materai 10.000) Fotocopy KTP Pemohon Fotocopy surat Keterangan Domisili Perusahaan Rekomendasi KUPP/KSOP Setempat (Khusus Bongkar Muat Pelabuhan) Fotocopy NPWP Perusahaan/Pribadi Fotocopy NIB Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (Khusus PT/CV)
2.	Prosedur	 Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan Pemohon mengambil nomor antrian untuk mendaftarkan permohonan Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas Pengolahan Surat Rekomendasi Penandatanganan Surat Rekomendasi Pengelolaan Pengadministrasian Surat Rekomendasi Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat Pemohon menerima Surat Rekomendasi Izin Bongkar Muat
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Jam
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Rekomendasi Izin Bongkar Muat
6.	Penanganan Pengaduan	 Langsung Petugas di kantor Kecamatan Satui Alamat : Jalan KH. Idham Chalid RT. 07 Desa Makmur Jaya Kec. Satui Tidak Langsung melalui media : Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter) Email : e-mail : kantorkecamatansatui@gmail.com Website : www.kec-satui.tanahbumbukab.go.id Kotak Saran/Pengaduan

7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34); Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28).
8.	Sarana dan Prasarana	Loket Pelayanan, Ruang Tunggu, Komputer, Printer, ATK, papan informasi tentang pelayanan, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Rak Penyimpanan Berkas, Internet/Wifi, AC, Parkir danToilet
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan Kecamatan Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanan Publik Motto " MANTAP (Melayani dengan Amanah, Nyaman,Transparan, Akuntabel dan Profesional) " Menerapkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) Pendidikan minimal SMA
10	Jumlah Pelaksana	4 orang terdiri dari 1 orang Kasi Pelayanan Umum 1 orang petugas loket dan 2 orang pengelola administrasi pelayanan non perizinan
11.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-
13.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan PengawasanPemerintah Daerah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern Laporan Harian Survei Kepuasan Masyarakat Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan Review perilaku pada e-kinerja setiap bulan olehatasan langsung

14. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI BEBAS BANJIR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Rekomendasi Bebas Banjir dari Kelurahan/Desa
''	. o.oyaratan	2. Surat Permohonan (Materai 10.000)
		3. Fotocopy KTP Pemohon
2.	Prosedur	Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa
		persyaratan 2. Pemohon mengambil nomor antrian untuk
		mendaftarkan permohonan
		Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas
		pemohon
		4. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka
		diproses, jika berkas tidak memenuhi persyaratan
		maka dikembalikan oleh petugas
		5. Pengolahan Surat Rekomendasi
		6. Penandatanganan Surat Rekomendasi
		7. Pengelolaan Pengadministrasian Surat Rekomendasi
		8. Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan
		Masyarakat 9. Pemohon menerima Surat Rekomendasi BebasBanjir
		9. Femonor menerima Surat Nekomendasi bebasbanjii
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Rekomendasi Bebas Banjir
6.	Penanganan Pengaduan	Langsung Petugas di kantor Kecamatan Satui
		Alamat : Jalan KH. Idham Chalid RT. 07 Desa
		Makmur Jaya Kec. Satui
		Tidak Langsung melalui media : Aplikasi Lapor (<u>www.lapor.go.id</u> , SMS 1708, mobile apps
		atau Twitter)
		- Email: <u>kantorkecamatansatui@gmail.com</u>
		- Website: <u>www.kec-satui.tanahbumbukab.go.id</u>
		3. Kotak Saran/Pengaduan
7	Danas Halama	4 11 1 11 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		2. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005
		tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
		Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
		Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
		3. Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas,
		Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
		(Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022
		Nomor 2); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun2010
		tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu
		Kecamatan;
		5. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34
		Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja
		Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten
		Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34);
		6. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28
		Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada
		Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten
		Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28).

8.	Sarana dan Prasarana	Loket Pelayanan, Ruang Tunggu, Komputer, Printer, ATK, papan informasi tentang pelayanan, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Rak Penyimpanan Berkas, Internet/Wifi, AC, Parkir danToilet
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan Kecamatan Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanan Publik Motto " MANTAP (Melayani dengan Amanah, Nyaman,Transparan, Akuntabel dan Profesional) " Menerapkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) Pendidikan minimal SMA
10	Jumlah Pelaksana	4 orang terdiri dari 1 orang Kasi Pelayanan Umum 1 orang petugas loket dan 2 orang pengelola administrasi pelayanan non perizinan
11.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-
13.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern Laporan Harian Survei Kepuasan Masyarakat Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan Review perilaku pada e-kinerja setiap bulan oleh atasan langsung

15. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PENELITIAN MAHASISWA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Rekomendasi Penelitian Mahasiswa dari Kampus Fotocopy KTP
2.	Prosedur	 Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan Pemohon mengambil nomor antrian untuk mendaftarkan permohonan Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas Pengolahan Surat Rekomendasi Penandatanganan Surat Rekomendasi Pengelolaan Pengadministrasian Surat Rekomendasi Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat Pemohon menerima Surat Rekomendasi Penelitian Mahasiswa
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Rekomendasi Penelitian Mahasiswa
6.	Penanganan Pengaduan	 Langsung Petugas di kantor Kecamatan Satui Alamat : Jalan KH. Idham Chalid RT. 07 Desa Makmur Jaya Kec. Satui Tidak Langsung melalui media : Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter) Email : e-mail : kantorkecamatansatui@gmail.com Website : www.kec-satui.tanahbumbukab.go.id Kotak Saran/Pengaduan
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34); Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28).

8.	Sarana dan Prasarana	Loket Pelayanan, Ruang Tunggu, Komputer, Printer, ATK, papan informasi tentang pelayanan, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Rak Penyimpanan Berkas, Internet/Wifi, AC, Parkir danToilet
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan Kecamatan Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanan Publik Motto " MANTAP (Melayani dengan Amanah, Nyaman,Transparan, Akuntabel dan Profesional) " Menerapkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) Pendidikan minimal SMA
10	Jumlah Pelaksana	4 orang terdiri dari 1 orang Kasi Pelayanan Umum 1 orang petugas loket dan 2 orang pengelola administrasi pelayanan non perizinan
11.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-
13.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern Laporan Harian Survei Kepuasan Masyarakat Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan Review perilaku pada e-kinerja setiap bulan oleh atasan langsung

16. STANDAR PELAYANAN SURAT DISPENSASI NIKAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Surat Pengantar Dispensasi Nikah dari KUA Fotocopy Surat Pengantar Nikah dari Desa Fotocopy KTP Calon Pengantin Fotocopy KK Calon Pengantin Pas foto Calon Pengantin ukuran 3 X 4 sebanyak @ 1 lembar Fotocopy KK dan KTP Kedua Orang Tua Calon Pengantin Fotocopy Akta Cerai/ Akta Kematian (Bagi mempelai yangstatus perkawinannya cerai mati/hidup)
2.	Prosedur	 Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan Pemohon mengambil nomor antrian untuk mendaftarkan permohonan Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas Pengolahan Surat Dispensasi Nikah Penandatanganan Surat Dispensasi Nikah Pengelolaan Pengadministrasian Surat Dispensasi Nikah Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat Pemohon menerima Surat Dispensasi Nikah
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Surat Dispensasi Nikah
6.	Penanganan Pengaduan	 Langsung Petugas di kantor Kecamatan Satui Alamat : Jalan KH. Idham Chalid RT. 07 Desa Makmur Jaya Kec. Satui Tidak Langsung melalui media : Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter) Email : e-mail : kantorkecamatansatui@gmail.com Website : www.kec-satui.tanahbumbukab.go.id Kotak Saran/Pengaduan
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022Nomor 2);

		 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34); Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28).
8.	Sarana dan Prasarana	Loket Pelayanan, Ruang Tunggu, Komputer, Printer, ATK, papan informasi tentang pelayanan, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Rak Penyimpanan Berkas, Internet/Wifi, AC, Parkir danToilet
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan Kecamatan Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanan Publik Motto " MANTAP (Melayani dengan Amanah, Nyaman,Transparan, Akuntabel dan Profesional) " Menerapkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) Pendidikan minimal SMA
10	Jumlah Pelaksana	4 orang terdiri dari 1 orang Kasi Pelayanan Umum 1 orang petugas loket dan 2 orang pengelola administrasi pelayanan non perizinan
11.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-
13.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan PengawasanPemerintah Daerah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern Laporan Harian Survei Kepuasan Masyarakat Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan Review perilaku pada e-kinerja setiap bulan olehatasan langsung

17. LEGALISASI SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN KAPAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat Keterangan Kepemilikan Kapal dari Desa
		2. Fotocopy KTP
		3. Fotocopy NPWP
		4. Foto Kapal
		5. Surat Keterangan dari Dinas Perhubungan Laut
2.	Prosedur	 Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan Pemohon mengambil nomor antrian untuk mendaftarkan permohonan Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas Pengolahan Surat Keterangan Kepemilikan Kapal Penandatanganan Surat Keterangan Kepemilikan Kapal
		 Pengelolaan Pengadministrasian Surat Keterangan Kepemilikan Kapal Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat Pemohon menerima Surat Keterangan Kepemilikan Kapal
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	20 Menit
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Kepemilikan Kapal
6.	Penanganan Pengaduan	 Langsung Petugas di kantor Kecamatan Satui Alamat : Jalan KH. Idham Chalid RT. 07 Desa Makmur Jaya Kec. Satui Tidak Langsung melalui media : Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter) Email : e-mail : kantorkecamatansatui@gmail.com Website : www.kec-satui.tanahbumbukab.go.id Kotak Saran/Pengaduan
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34);

		6. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28).
8.	Sarana dan Prasarana	Loket Pelayanan, Ruang Tunggu, Komputer, Printer, ATK, papan informasi tentang pelayanan, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Rak Penyimpanan Berkas, Internet/Wifi, AC, Parkir danToilet
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan Kecamatan Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanan Publik Motto "MANTAP (Melayani dengan Amanah, Nyaman,Transparan, Akuntabel dan Profesional) " Menerapkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) Pendidikan minimal SMA
10	Jumlah Pelaksana	4 orang terdiri dari 1 orang Kasi Pelayanan Umum 1 orang petugas loket dan 2 orang pengelola administrasi pelayanan non perizinan
11.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-
13.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern Laporan Harian Survei Kepuasan Masyarakat Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan Review perilaku pada e-kinerja setiap bulan oleh atasan langsung